

**RENCANA KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENASAR  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Perkara yang diselesaikan	85 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
2	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	100%
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, tempat dan Para Pihak	100%
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %
4	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	100%

**Matrik Rencana Kinerja Anggaran Tahunan  
Tahun 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah, tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut teemuan pemeriksa melakukan bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan.</li> <li>2. Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelola anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitoring, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.</li> <li>3. terselesaikannya kerugian Negara, tersusunnya pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan Tgr, terlaksananya bimbingan dan supervisi.</li> <li>4. Meningkatnya PNBPN Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan dan penelaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBPN yang tepat sasaran.</li> <li>5. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.</li> <li>6. Tersedianya operasional/ pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana dilingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan.</li> <li>2. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Tehnologi Informasi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p>
3	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan TUN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara</li> <li>2. Peningkatan proses administrasi Perkara</li> <li>3. Penyediaan dana Pelaksanaan sidang keliling (Hakim Terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat Terhadap keadilan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">85%</p> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>

**Matrik Penetapan Kinerja Anggaran  
Tahun 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program /Kegiatan	Anggaran
1.	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan.	<p>1. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah, tanggapan atas temuan pemeriksa internal dan eksternal, rencana tindak lanjut temuan pemeriksa melakukan bimbingan dan supervisi, evaluasi dan laporan kegiatan.</p> <p>2. Prosentase penyerapan anggaran meningkat, tersusunnya standar pelaksanaan pengelola anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran, monitoring, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.</p> <p>2. terselesaikannya kerugian Negara, tersusunnya pedoman pelaksanaan tuntutan ganti rugi dan laporan Tgr, terlaksananya bimbingan dan supervisi.</p> <p>3. Meningkatnya PNBPN Mahkamah Agung, tersusunnya perencanaan, pemantauan dan penelaahan perkembangan dan penggunaan kembali PNBPN yang tepat sasaran.</p> <p>4. Terselenggaranya pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, supervisi ke Satker, tertib administrasi persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan administrasi keuangan.</p> <p>5. Tersedianya operasional/ pemeliharaan perkantoran badan urusan administrasi dan daerah.</p>	<p>100%</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi</p> <p>2. Pembayaran gaji dan tunjangan.</p> <p>3. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.</p>	<p>Rp.105.239.000,-</p> <p>Rp.5.836.300.000,-</p> <p>Rp.630.476.000,-</p>
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya.	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyediaan peradilan.	100 %	1. Pengadaan server (aplikasi gugatan online, sms gateway & media center)	Rp.99.275.000,-

		2. Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi.	100 %	2. Pengadaan perangkat pendukung sarana dan prasarana penyelesaian perkara 3. Pengadaan perangkat pendukung sarana dan prasarana kesekretariatan 4. Pembangunan gedung tahap IV	Rp.106.000.000,-  Rp.160.000.000,-  Rp.1.750.000.000,-
3	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan TUN.	1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara. 2. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara. 3. Penyediaan dana Pelaksanaan sidang Keliling (Hakim Terbang) untuk memberikan akses kepada Masyarakat Terhadap Keadilan.	85 %  100 %  100 %	1. Manajemen Peradilan 2. Operasional Perkara Prodeo 3. Operasional Posbankum	Rp.25.000.000,-  Rp.1.000.000,-  Rp.22.200.000,-

